

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA PROVINSI JAWA TIMUR

Andreas Yahya Pesik
andreyahyapesik@gmail.com
Endah Sulistyowati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine and analyze economic growth, local-owned source revenue, and general allocation funds on Capital Expenditure of local governments of districts/cities in East Java Province 2018-2020. The research was quantitative. Moreover, the population was all districts/cities which consisted of 29 districts and 9 cities during 2018-2020. In total, there were 114 respondents as the sample. Furthermore, the research was quantitative. Additionally, the data were secondary, in the form of budget realization reports and presented within the Statistics Centre Service of the local government of districts/cities in East Java Province 2018-2020. The data analysis technique used multiple linear regression. In addition, the research result concluded as follows: 1) Economic Growth had a positive and significant effect on Capital Expenditure of local government of districts/cities in East Java Province, 2) Local-owned Source Revenue had a positive and significant effect on Capital Expenditure of local government of districts/cities in East Java Province, 3) General Allocation Funds had a positive but insignificant effect on Capital Expenditure of local government of districts/cities in East Java Province.

Keywords: growth, local-owned source revenue, general allocation fund, capital expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 38 kabupaten/kota yang mana terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dengan periode penelitian tahun 2018 - 2020 diperoleh sampel sebanyak 114 responden. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan realisasi anggaran yang disajikan dalam laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2020. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, 2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, 3) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: pertumbuhan, PAD, DAU, belanja modal

PENDAHULUAN

Pada era reformasi sekarang ini, pembangunan daerah memang diperlukan serta penting adanya untuk melakukan peningkatan pembangunan daerah, dikarenakan adanya pembangunan daerah tersebut merupakan bagian yang terstruktur dari terwujudnya pembangunan nasional, sehingga pembangunan daerah pada era reformasi ini tidak dapat lepas dari adanya prinsip otonomi daerah. Dengan adanya UU Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 yang berisi mengenai Pemerintah Daerah dan UU Republik Indonesia No.33

Tahun 2004 yang berisi mengenai Perimbangan Keuangan Daerah, pelaksanaan otonomi daerah ini didukung dengan adanya kedua UU tersebut. Kedua UU pendukung pelaksanaan otonomi daerah ini merupakan pengganti dari UU Republik Indonesia No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Pemerintah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemberlakuan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 10 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan itu sendiri antara lain Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), selain itu juga terdapat sumber dana lain yaitu yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah.

Alokasi tersebut didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas pemerintah daerah atau fasilitas publik. Menurut Ulum (2008:251) menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah lebih meningkatkan alokasi untuk Belanja Modal dengan cara meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengalokasikan Belanja Modal.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncorowati, 2017). Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian (Susanti dan Fahlevi, 2016). Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak kepada Pertumbuhan Ekonomi. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat akan dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong atau menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Hasil sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syukri dan Hinaya (2019) menunjukkan desentralisasi fiskal memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan.

Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yakni sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi

adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya, dimana persentase belanja lainnya lebih besar daripada belanja modal itu sendiri. Jadi hal seperti inilah yang menyebabkan kualitas pelayanan publik tidak naik, melainkan bisa semakin menurun. Hal ini sesuai dengan penelitian Lailatul (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap meningkatnya Belanja Modal. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Ikhwan (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dikarenakan tingginya nilai PAD cenderung tidak memiliki belanja modal yang besar, hal ini dikarenakan PAD digunakan untuk membiayai belanja lain seperti belanja rutin atau operasional.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran daerah salah satunya adalah Belanja Modal. Adapun tujuan dari transfer salah satunya dalam bentuk Dana Alokasi Umum yaitu untuk mengurangi perbedaan keuangan dan kemampuan pendanaan antar daerah dengan cara ini maka pemberian Dana Alokasi Umum antar daerah tidak sama jumlahnya. Daerah dapat memakai dana transfer yang berupa bantuan Dana Alokasi Umum yang digunakan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan yang terbaik melalui Belanja Modal. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan pemerintahannya, yang berakibat pada terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Upaya pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan fiskal tersebut adalah dengan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah pusat berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Pengalokasian DAU diserahkan dalam bentuk *block grant*, yaitu bantuan dana yang tidak disertai dengan syarat-syarat tertentu yang mengakibatkan dana tersebut mengalami pemborosan. Pada dasarnya DAU seharusnya dipergunakan untuk belanja modal guna pembangunan daerah, tetapi kenyataannya sebagian besar dana tersebut dipakai oleh pemerintah daerah untuk belanja pegawai yang merupakan komponen belanja langsung. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Made dan Ni Putu (2018) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, dikarenakan transfer dana dari pemerintah pusat semakin tinggi maka belanja modal untuk pembangunan daerah juga semakin baik, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Syukri dan Hinaya (2019) menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dirangkai oleh peneliti, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian sebagai berikut: (1) Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal? (2) Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal? (3) Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal?. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2020). (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2020). (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2020).

TINJAUAN TEORITIS

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Menurut Sukirno (2010) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat

dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi (Nuraini, 2017). Menurut Kuznets (2007) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang diperlukan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli, pengertian Pertumbuhan Ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka waktu tertentu yang kemudian menaikkan kapasitas suatu negara dalam menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan Ekonomi dapat diketahui dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala regional atau daerah sebagai alat ukur. Tujuan dari PDB dan PDRB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan Ekonomi memiliki sifat dinamis, yaitu suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Pertumbuhan Ekonomi tumbuh dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan bahkan puluhan tahun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2014 : 67) pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu: "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah".

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 21, yang merupakan bagian dari dana perimbangan diantaranya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa tidak semua daerah memiliki potensi pendanaan yang merata antar daerah. Bagi daerah yang memiliki sumber pendapatan asli daerah yang rendah tentunya akan tertinggal dibanding daerah yang memiliki sumber pendapatan yang tinggi. Karenanya DAU hadir untuk mengatasi kesenjangan tersebut agar terwujudnya pemerataan pembangunan.

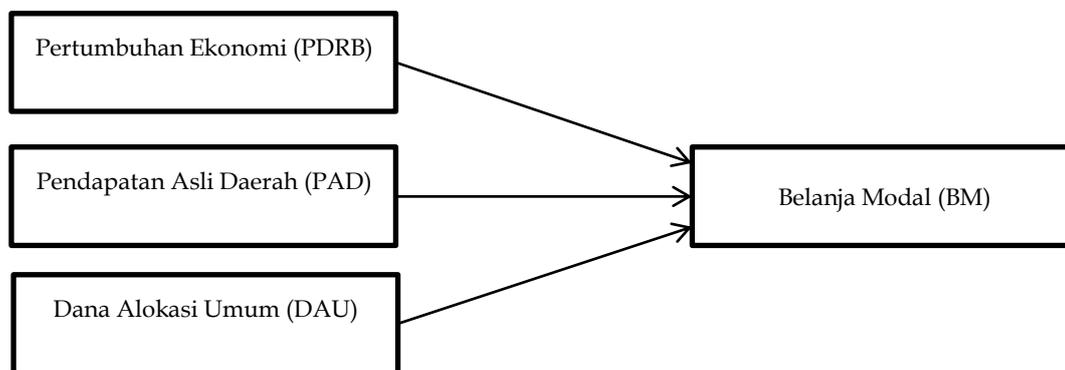
Belanja Modal

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2014 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan Belanja Modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah di mana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Menurut Halim (2014:101) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Anita *et al.*, (2016) dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian yang dapat ditarik adalah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian Syukri dan Hinaya (2019) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian Suryani dan Pariani (2018) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Riau. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Riau. Penelitian Rumefi (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur), sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur).

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Terhadap Belanja Modal

Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu Pertumbuhan Ekonomi daerah. Biasanya apabila Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi Belanja Modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan

situasi pada tahun anggaran. Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita. Secara tradisional Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/PDRB.

Desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah. Dengan adanya pengaruh yang signifikan antara desentralisasi fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi maka pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi Pertumbuhan Ekonomi. Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam pembangunan daerah, dengan mengemukakan sejumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Hasil sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syukri dan Hinaya (2019) menunjukkan desentralisasi fiskal memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan.

H₁ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No.32/24). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan tersebut.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut dan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD diharapkan akan mampu memberi efek yang signifikan terhadap Belanja Modal oleh pemerintah. Sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar terutama bila dikaitkan dengan politis. Hal ini sesuai dengan penelitian Lailatul (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap meningkatnya Belanja Modal.

H₂ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

Pelaksanaan desentralisasi, dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri. Pendanaan ini untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang ada di daerah (UU No. 33/2004).

Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Hampir sama dengan PAD, DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Bedanya PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DAU berasal dari APBN yang mempunyai tujuan khusus. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Made dan Ni Putu (2018) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, dikarenakan transfer dana dari pemerintah pusat semakin tinggi maka belanja modal untuk pembangunan daerah juga semakin baik.

H₃ : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka dan analisisnya menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014).

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah kota/provinsi Jawa Timur tahun 2018 - 2020.

Tabel 1
Nama - Nama Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

Kabupaten	Kota
1. Kabupaten Pacitan	1. Kota Kediri
2. Kabupaten Ponorogo	2. Kota Blitar
3. Kabupaten Trenggalek	3. Kota Malang
4. Kabupaten Tulungagung	4. Kota Probolinggo
5. Kabupaten Blitar	5. Kota Pasuruan
6. Kabupaten Kediri	6. Kota Mojokerto
7. Kabupaten Malang	7. Kota Madiun
8. Kabupaten Lumajang	8. Kota Surabaya
9. Kabupaten Jember	9. Kota Batu
10. Kabupaten Banyuwangi	
11. Kabupaten Bondowoso	
12. Kabupaten Situbondo	
13. Kabupaten Probolinggo	
14. Kabupaten Pasuruan	
15. Kabupaten Sidoarjo	
16. Kabupaten Mojokerto	
17. Kabupaten Jombang	
18. Kabupaten Nganjuk	
19. Kabupaten Madiun	
20. Kabupaten Magetan	
21. Kabupaten Ngawi	
22. Kabupaten Bojonegoro	
23. Kabupaten Tuban	
24. Kabupaten Lamongan	
25. Kabupaten Gresik	
26. Kabupaten Bangkalan	
27. Kabupaten Sampang	

28. Kabupaten Pamekasan

29. Kabupaten Sumenep

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel merupakan salah satu cara yang digunakan oleh penulis untuk mengambil sampel atau contoh representative dari populasi yang tersedia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Jawa Timur baik kabupaten ataupun kota dari tahun 2018 - 2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel yang digunakan untuk tujuan, target serta pertimbangan tertentu dalam menentukannya.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website (www.bps.go.id). Dari Laporan Realisasi APBD diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.

Variabel dan Definisi Operasional

Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014) variabel merupakan segala sesuatu sifat atau nilai dari obyek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel, yaitu: *Variabel Independen* (Variabel Bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependen* (terikat). *Variabel independen* dalam penelitian ini, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum. *Variabel Dependen* (Variabel Terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel *independen* (bebas). Yang menjadi variabel *dependen* dalam penelitian ini, yaitu pengalokasian belanja modal.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah variabel yang tidak bergantung pada variabel lain yang mana dengan cara memberikan arti.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita, semakin tingginya pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita, yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{(PDRB_{t-1})} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasar peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPB) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), yang dirumuskan dengan:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan akan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil pula. Sebaliknya jika daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan akan fiskalnya besar akan memperoleh DAU yang relatif besar (Suyanto, 2019). Rasio Dana Alokasi Umum diperoleh dari Dana Alokasi Umum dibagi dengan total pendapatan daerah dapat dinyatakan sebagai berikut:

DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar

Dimana:

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (memperoleh atau menambah aset tetap). Indikator variabel belanja modal ini dapat diukur dengan sebagai berikut:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan alat ukur yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih atau menguji hubungan antara variabel bebas (pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum) dan variabel terikat (belanja modal) (Ghozali, 2011: 96). Analisis regresi berganda akan dilakukan apabila memiliki minimal 2 variabel independen. Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 PDRN + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + \varepsilon$$

Keterangan:

BM : Belanja Modal
 α : Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien variabel bebas
 PDRB : Pertumbuhan Ekonomi
 PAD : Pendapatan Asli Daerah
 DAU : Dana Alokasi Umum
 ε : Error

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel dependen dan independen memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk menghindari

terjadinya bias, data yang digunakan harus terdistribusi dengan normal. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian normalitas menggunakan *probability plot* menurut Ghozali (2016:154) adalah jika titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka pola distribusi dikatakan normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka pola distribusi dianggap tidak normal, sehingga model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2016:106). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut, jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* (TOL) tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIF = 10$ maka $Tolerance = 1/10 = 0,1$ (Ghozali, 2016:106).

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134). Apabila memiliki pola tertentu, maka titik yang terbentuk dalam suatu pola memiliki bentuk yang teratur (melebar, bergelombang, dan menyempit) yang telah terjadi pada heteroskedastisitas. Apabila memiliki pola yang jelas, maka titik akan menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka dapat dikatakan tidak akan terjadi heteroskedastisitas. Sehingga dapat dibuktikan bahwa model regresi dapat digunakan dalam penelitian apabila tidak adanya heteroskedastisitas disetiap variabelnya.

Uji Goodness of Fit

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model dilakukan menggunakan uji F dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut, jika nilai signifikansi Uji F $> 0,05$, menunjukkan variabel kualitas layanan, harga dan promosi terhadap kepuasan pelanggan tidak layak untuk digunakan model penelitian karena tingkat signifikansi melebihi batas yang telah ditentukan, sedangkan jika nilai signifikansi Uji F $< 0,05$, menunjukkan variabel kualitas layanan, harga dan promosi terhadap kepuasan pelanggan layak untuk digunakan dalam model penelitian.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien korelasi R digunakan untuk mengetahui seberapa besar keterkaitan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat kepuasan pelanggan. Rentang nilai yang berlaku adalah 0 dan 1 dengan kriteria sebagai berikut: jika $R = 1$ atau mendekati 1, berarti hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah sangat kuat atau positif searah, jika $R = -1$ atau mendekati -1, berarti hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah sangat kuat namun arahnya negatif atau berbalik arah, jika $R = 0$ atau mendekati 0, berarti hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah sangat lemah atau tidak memiliki hubungan sama sekali.

Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh semua variabel bebas secara parsial terhadap parsial terikat. Uji t dengan menentukan signifikansi kepercayaan (α) sebesar 0,05

(5%), maka kriteria untuk menentukan hipotesis diterima atau ditolak adalah sebagai berikut: Hipotesis, $H_0: b_1, b_2, b_3 = 0$ yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. $H_1: b_1, b_2, b_3 \neq 0$ yang artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel dependen terhadap variabel independen. Pada uji t nilai probabilitas dilihat pada hasil pengolahan dari program SPSS. Pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS statistik parametrik sebagai berikut: jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima, sedangkan jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Analisis Linier Berganda

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui suatu hubungan antara variabel independen (pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum) dengan variabel dependen (belanja modal). Dari data yang diolah dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan pada Tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	74.680	27.630		2.703	.008
	PERTUMBUHAN EKONOMI	.510	.135	.242	3.764	.000
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	.817	.104	.611	7.845	.000
	DANA ALOKASI UMUM	.053	.032	.123	1.642	.103

a. Dependen Variabel: Belanja Modal

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022

Berdasarkan nilai- nilai tersebut, maka persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$BM = 74,680 + 0,510 PE + 0,817 PAD + 0,053 DAU + \epsilon$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Konstanta (α) Besarnya nilai konstanta (α) yang terjadi, yaitu sebesar 74,680, kondisi ini dapat mencerminkan jika variabel independen yang terdiri dari PE, PAD dan DAU sama dengan 0 (nol) atau tidak ada perubahan, maka variabel tingkat belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur sebesar 74,680. Koefisien Regresi Pertumbuhan Ekonomi (PE) besarnya nilai koefisien regresi yang diperoleh Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar 0,510 bersifat positif yang mana mencerminkan hubungan yang searah antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat diindikasikan bahwa semakin besar Pertumbuhan Ekonomi yang didapat oleh pemerintah maka akan semakin meningkatkan Belanja Modal pemerintah provinsi. Koefisien Regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) besarnya nilai koefisien regresi yang diperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,817 bersifat positif yang mana mencerminkan hubungan yang searah antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat diindikasikan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang didapat oleh pemerintah maka akan semakin meningkatkan Belanja Modal pemerintah provinsi. Koefisien

Regresi Dana Alokasi Umum (DAU) besarnya nilai koefisien regresi yang diperoleh Dana Alokasi Umum sebesar 0,053 bersifat positif yang mana mencerminkan hubungan yang searah antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat diindikasikan bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum yang didapat oleh pemerintah maka akan semakin meningkatkan Belanja Modal pemerintah provinsi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah sebuah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini diketahui dari uji statistik lain yaitu uji sampel Test *Kolmogorov - Smirnov*. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih kecil, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos uji normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos uji normalitas apabila nilai signifikan uji Kolmogorov - Smirnov lebih besar dari 0,05, Ghazali (2011). Hasil uji *Kolmogorov - Smirnov* yang disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut:

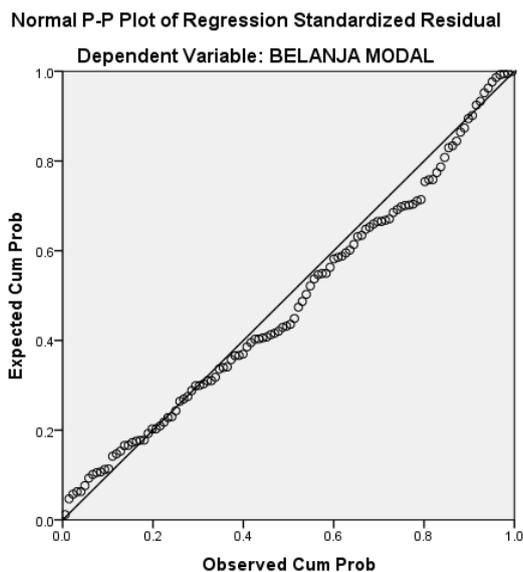
Tabel 3
Hasil Uji Kolmogorov - Smirnov

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	105.89802832
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.082
	Negative	-.037
Kolmogorov-Smirnov		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.059 ^c
a. Test distribution is Normal		
b. Calculated from data		
c. Lilliefors Significance Correction		

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3 diatas hasil dari pengujian normalitas data terhadap 114 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2020 menunjukkan bahwa data tersebut normal yang mana nilai Asymp. Sig. (2 - tailed) sebesar 0,059 diatas nilai signifikan yang telah diasumsikan sebelumnya yaitu sebesar 0,05.

Hasil ini dapat diperkuat dengan menggunakan grafik normal plot, apabila grafik normal plot menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas dalam penelitian ini:



Gambar 2
Grafik P - plot

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022

Berdasarkan Gambar 2 hasil uji normalitas data dengan menggunakan *P - plot* grafik terlihat bahwa penyebaran titik - titik mengikuti arah garis diagonal tersebut. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal atau dengan kata lain model regresi layak dipakai karena memenuhi salah satu asumsi yang telah disebutkan sebelumnya yaitu penyebaran titik - titik yang mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan hasilnya konsisten dengan uji Kolmogorov - Smirnov sebelumnya, sehingga model regresi ini benar memenuhi Uji Normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan ada tidaknya gejala multikolinieritas dengan melihat pada nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dalam penelitian. Jika nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10 maka variabel tersebut tidak terjadi multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pertumbuhan Ekonomi	.856	1.168
Pendapatan Asli Daerah	.581	1.722
Dana Alokasi Umum	.628	1.592

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022

Berdasarkan hasil yang telah diuji yang ditunjukkan pada Tabel 4 diatas, dapat diketahui bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terindikasi adanya multikolinieritas atau tidak mengandung adanya gejala multikolinieritas antar variabel independen.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara periode tertentu dengan periode sebelumnya. Berikut ini hasil nilai Uji Durbin Watson pada model regresi:

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
 Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1.849

a. Dependent Variable: Belanja Modal

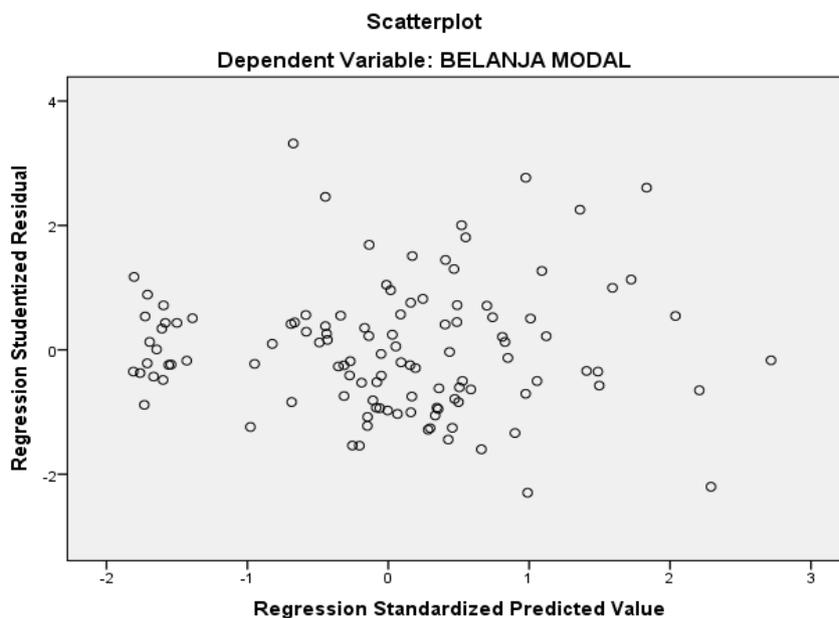
b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2022

Berdasarkan pada Tabel 5 terlihat bahwa nilai uji Durbin Watson (DW) yang dihasilkan sebesar 1,849 terletak diantara -2 sampai +2 yang berarti bahwa data yang diuji tidak mengandung atau bebas dari autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual (kesalahan pengganggu) satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian tidak terjadi perbedaan (tetap) disebut homokedastisitas sedangkan jika terjadi perbedaan disebut heteroskedastisitas. Model penelitian yang baik apabila model tersebut homoskedastisitas atau dengan kata lain tidak terjadi gejala heteroskedastisitas didalam model penelitian tersebut. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini:



Gambar 3
Hasil Uji Heterokedastisitas
 Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022

Berdasarkan pada tampilan grafik scatterplot terlihat bahwa plot menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak membentuk pola

tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Kelayakan Model

Uji F

Uji F atau yang biasa disebut Uji ANOVA bertujuan untuk menguji apakah model regresi layak di gunakan atau tidak layak dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (nilai signifikansi Uji F < 0,05). Uji F digunakan untuk menguji apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2020. Berikut hasil perhitungan dari Uji F:

Tabel 6
Hasil Perhitungan Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1999796.779	3	666598.926	57.863	.000 ^b
Residual	1267226.341	110	11520.239		
Total	3267023.120	113			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel ANOVA diatas hasil regresi Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2020 menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 57,863 dan Ftabel 2,45 sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Belanja Modal sehingga model ini layak digunakan dalam penelitian.

Koefisien Determinan (R²)

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependennya dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi antara 1 (satu) dan 0 (nol). Jika nilai R² mendekati 1 maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat, sebaliknya jika nilai R² mendekati 0 (nol) maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah. Berikut hasil perhitungan nilai Koefisien Determinasi yang diperoleh:

Tabel 7
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.782 ^a	.612	.602	107.332378

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 7 hasil Koefisien Determinasi dari nilai Adjusted R^2 sebesar 0,612 yang berarti atau sebesar 61,2%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum selama tahun 2018 – 2020 mempengaruhi Belanja Modal sebesar 61,2%, sedangkan sisanya sebesar 38,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Karena nilai Koefisien Determinasi mendekati 1 (satu) maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

Pengujian Hipotesis

Uji t

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial apakah terdapat hubungan antara masing – masing variabel independen, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap variabel dependen, yaitu Belanja Modal dengan tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 0,05$ (nilai signifikansi Uji t < 0,05). Hasil dari pengujian Uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	74.680	27.630		2.703	.008	
	PERTUMBUHAN EKONOMI	.510	.135	.242	3.764	.000
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	.817	.104	.611	7.845	.000
	DANA ALOKASI UMUM	.053	.032	.123	1.642	.103

a. Dependen Variabel: Belanja Modal

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022

Berdasarkan pada hasil Tabel 8, maka dapat diperhatikan bahwa: Pertumbuhan Ekonomi, uji pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal berdasarkan pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} pertumbuhan ekonomi sebesar 3,764 dan t_{tabel} sebesar 1,980 ($t_{hitung} < t_{tabel}$) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima sehingga variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan Asli Daerah, uji pengaruh variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja modal berdasarkan pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} pendapatan asli daerah sebesar 7,845 dan t_{tabel} sebesar 1,980 ($t_{hitung} < t_{tabel}$) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 diterima sehingga variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Dana Alokasi Umum, uji pengaruh variabel dana alokasi umum terhadap belanja modal berdasarkan pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} pertumbuhan ekonomi sebesar 1,642 dan t_{tabel} sebesar 1,980 ($t_{hitung} < t_{tabel}$) dengan nilai signifikan sebesar 0,103 yang mana lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 ditolak sehingga variabel dana alokasi umum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dengan menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,510 dan nilai t_{hitung} sebesar 3,764 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut

dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima yang berarti Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan *output* perkapita yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan (Putro, 2010). Adanya kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertambahnya investasi modal swasta maupun pemerintah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa suatu faktor produksi di suatu daerah (Sularno, 2013). PDRB yang tinggi menjadi salah satu faktor pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian maupun pembangunan dalam hal infrastruktur. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan publik melalui belanja modal, karena pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana didapatkan dari pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan *output* perkapita yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. PDRB yang tinggi menjadi salah satu faktor pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian maupun pembangunan dalam hal infrastruktur. Terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan belanja modal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayem dan Pratama (2018) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah naik, maka pemerintah daerah akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dengan menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,817 dan nilai t_{hitung} sebesar 7,845 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam mengembangkan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Halim dan Kusufi, 2013). Daerah yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan demikian pemerintah daerah akan berinisiatif agar dapat lebih menggali potensi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki termasuk salah satunya dengan cara meningkatkan pembangunan infrastruktur sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Menurut Mardiasmo (2004:132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk pemerintah daerah salah satunya untuk pembiayaan atas belanja daerah, maka pemerintah daerah seoptimal mungkin berusaha untuk menggunakan segala potensi daerah yang dimilikinya untuk memperoleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah supaya dapat membiayai dari kegiatan atas fungsi *public service* untuk masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah perlu menganggarkan Belanja Modal dan Belanja Daerah untuk

menciptakan sarana dan prasarana untuk masyarakat di daerah. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rumefi (2018), Ayem dan Pratama (2018) serta Susanti dan Fahlevi (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan memper timbangkan Pendapatan Asli Daerah yang di terima, sehingga Pemerintah Daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah harus menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal juga akan semakin tinggi.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Modal dengan menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,053 dan nilai t_{hitung} sebesar 1,642 dengan nilai signifikansi sebesar 0,103 ($0,103 > 0,05$). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen dari pendapatan dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). DAU di berikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dalam membenahi tatanan daerah serta peningkatan pelayanan daerah untuk masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung dengan DAU yang diberikan untuk meningkatkan pelayanan daerahnya (David dan Priyo, 2007). Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri dengan mengembangkan pendapatan daerahnya untuk mendanai peningkatan pelayanan daerah.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal, hal tersebut dikarenakan pemerintah dalam membiayai pembangunan daerah menggunakan dana alokasi umum. Terdapat aturan khusus kegunaan DAU yang telah ditetapkan terutama untuk dialokasikan pada belanja modal. Sehingga besar kecilnya DAU yang diberikan tidak mempengaruhi belanja modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian belanja modal di provinsi Jawa Timur tahun 2018 - 2020 memiliki jumlah sampel sebanyak 114 dan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah naik, maka pemerintah daerah akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana. (2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal juga akan semakin tinggi. (3) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam membiayai pembangunan daerah menggunakan dana alokasi umum, sehingga besar kecilnya DAU yang diberikan tidak mempengaruhi belanja modal.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diimplementasikan, adapun beberapa hal yang dapat menjadi masukan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur diharapkan mampu untuk meningkatkan kemandirian daerahnya lewat otonomi daerah dan juga mengurangi ketergantungan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dan juga untuk lebih memperhatikan lagi pembangunan infrastruktur bagi masyarakat yang berada di pelosok desa atau di desa – desa terpencil agar mereka juga dapat menikmati infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah dan diharapkan akan pembangunannya dapat merata. Sehingga pelayanan publik akan tersedia dengan baik dan juga akan meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitiannya dan dapat menambahkan variabel independen dalam penelitian ini selain Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum agar hasil dari penelitiannya dapat lebih baik.

Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah diimplementasikan dan juga dengan kesimpulan yang telah disusun, maka terdapat keterbatasan sebagai berikut: Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa terdapat keterbatasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: (1) Penelitian dilakukan pada semester 7 (tujuh) dimana penulis masih memiliki mata kuliah lain yang harus ditempuh bersamaan dengan pengerjaan Laporan Kuliah Kerja Profesi dan penulis juga merupakan seorang pekerja yang sering melakukan perjalanan dinas keluar kota. (2) Proses dalam pengambilan data untuk penelitian yang cukup rumit dan memakan waktu lama dikarenakan kurangnya informasi penulis terhadap proses-proses perijinan dalam Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (3) Dalam penelitian ini hanya menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang memuat tentang realisasi anggaran Kabupaten/Kota Jawa Timur, PDRB atas dasar harga berlaku, dan dana perimbangan (dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan dana bagi hasil) data yang diperoleh pada periode 2018 – 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, L., N. Dali dan M. Abdullah. 2016. Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*. 1(2):44-55.
- Ayem, S dan D. D. Pratama. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Akuntansi Dewantara*. 2(2):169-182.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2021. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (miliar rupiah), 2016–2020*.
- Suryani, F. D., dan E. Pariani. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*. 6(1).
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi V. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Halim, A. 2014. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP–AMP YKPN. Yogyakarta.
- Halim, A dan Kusufi. M. S. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.

- Ikhwan, P. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi*. 5(2): 1-20.
- Kuncorowati, D. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2012. *Universitas Negeri Yogyakarta e-journal*.
- Kuznets, S. 2007. *Economic Growth and Income Inequality*. The American Economic Review. Volume XLV.
- Lailatul, M. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*
- Made, J. A., dan S. Ni Putu. 2018. Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *Universitas Udayana*. Bali.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Menteri Keuangan RI. 2014. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 91/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Jakarta.
- Nuraini, I. 2017. Kualitas Perumbuhan Ekonomi Daerah kabupaten/Kota Di Jawa Timur. Unevirsitias Muhammadiyah Malang. Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Manajemen*. 2(2): 122-130.
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Priyo, A. H., dan David, H. 2007. Hubungan Antara DAU, Belanja Modal, PAD dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi*. Makasar
- Putro, N. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Rumefi, U. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Manajemen Magistra*. 2(2):122-130.
- Sularno, F. M. 2013. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Studi Kasus Pada kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Skripsi*. Universitas Widyatama. Bandung
- Sukirno, S. 2010. *Makroekonomi. Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. PT. Raja Grasindo Perseda. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Susanti, S. dan Fahlevi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. 1(1):183-191.
- Suyanto, S. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Korelasional*. Bosscript. Klaten Selatan.
- Syukri, M, dan P. Hinaya. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Unanda*. 2(2):30
- Ulum, M.D, I. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. UMM PRESS. Malang
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
 _____ No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah